

DAFTAR PUSTAKA

- Adonteng-Kissi, O. (2023). Cultural responsiveness in child protection: Stakeholders and parental perceptions of working children and culture-appropriate assessment in Ghana. *Child & Family Social Work*, 28(2), 456–468.
- Amalia, & Nugroho. (2022). Referensi terkait pendampingan DP3AP2KB terhadap pemulihan korban kekerasan perempuan dan anak. Di akses <https://scholar.google.com/scholarAmalia+Nugroho+2022+DP3AP2KB+pendampingan+korban+kekerasan+anak>
- Arsena. (2024). Referensi terkait keterbatasan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan responsivitas pelayanan publik. Di akses di <https://scholar.google.com/scholar+birokrasi+responsivitas+pelayanan+publik>
- Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe. (2024). Kota Lhokseumawe dalam Angka 2024. BPS Kota Lhokseumawe. <https://lhokseumawekota.bps.go.id>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge.
- Dewi, M. R., Paraniti, A. A. S. P., & Hariyono, B. (2023). Optimalisasi pelayanan publik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*.
- Dewi. (2025). Kualitas Pelayanan Penanganan Kasus Kekerasan Fisik Anak (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe). Universitas Malikussaleh.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Lhokseumawe. (2024). Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Lhokseumawe. DP3AP2KB Kota Lhokseumawe.
- Dini Oktavia Putri, et al. (2024). Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di Kabupaten Bintan.
- Dwiyanto, A. (2018). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Erlich. (2021). Referensi terkait perilaku birokrasi dan faktor eksternal yang memengaruhi responsivitas pelayanan publik. Di akses <https://scholar.google.com/scholarErlich+2021+birokrasi+responsivitas+pelayanan+publik>
- Girsang, K. N., Fazil, M., Ali, M., Mardhiah, A., & Zahari. (2025). Strategi komunikasi Kantor Urusan Agama dalam sosialisasi program keagamaan pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 4(6), 10262–10280. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i6.11460>

- Handayani. (2020). Referensi terkait kapasitas kelembagaan, anggaran, dan responsivitas layanan DP3AP2KB.
<https://scholar.google.com/Handayani+DP3AP2KBresponsivitas+pelayanan>
- Hardiyansyah. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media. Diakses <https://books.google.com/booksHardiyansyah+Kualitas+Pelayanan+Publik+Konsep+Dimensi+Indikator+dan+Implementasinya>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Data dan Informasi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta: Kemen PPPA
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Tahun 2024*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2025). *Pedoman Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA)*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2024). *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*.
- Kurniasari, N. (2019). *Pelayanan Perlindungan Anak dalam Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Anak*.
- Kurniawan, A. (2020). Referensi terkait responsivitas organisasi publik dalam pelayanan masyarakat.
- Mailis. (2023). *Manajemen Komunikasi dalam Pengelolaan Objek wisata Museum Samudra Pasai di Aceh Utara*. Universitas Malikussaleh.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moralista, M., & Rueda, R. (2023). *Evaluation of the Community-Based Integrated Child Protection Program in Soppeng Regency*.
- Mutia. (2022). *Responsivitas Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat*.
- Naufal, & Siahaan. (2024). *Responsivitas Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat Kota Binjai dalam Mengatasi Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Binjai*.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy (Kebijakan Publik)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). *Government at a Glance 2020*. Paris: OECD Publishing.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. *Journal of Retailing*, 64(1), 12–40.
- Pemerintah Kota Lhokseumawe. (2024). *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2024–2025*. Pemerintah Kota Lhokseumawe. <https://lhokseumawekota.go.id>
- Pranowo, & Lestari. (2019). Referensi terkait koordinasi lintas sektor dalam penanganan kekerasan terhadap anak.
- Putri, R., & Wibowo, A. (2023). *Pendampingan psikososial terhadap perempuan dan anak korban kekerasan*. *Jurnal Administrasi Publik*.

- Rahmawati. (2021). Referensi terkait peran DP3AP2KB sebagai fasilitator layanan perlindungan anak.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2016). Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rebbe, R., et al. (2025). Child Protection Responses to Domestic Violence Exposure: Co-Occurring Safety Concerns and Investigation Outcomes.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Sari, & Rahman. (2022). Responsivitas Pelayanan Publik dalam Penanganan Kasus Sosial dan Kelompok Rentan.
- Sari, N., & Pratiwi, D. (2022). Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak melalui Pendekatan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan Korban Kekerasan. Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Sari, N., & Rahmawati, D. (2022). Kolaborasi Lintas Sektor dalam Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Jurnal Administrasi Publik.
- Setianingrum. (2018). Referensi terkait struktur birokrasi, budaya organisasi, dan hambatan responsivitas pelayanan publik.
- Suadi, et al. (2024). Referensi terkait koordinasi antarinstansi dalam perlindungan anak. Diakses <https://scholar.google.com/scholarSuadikoordinasianantarinstansi>
- Subarsono. (2019). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi ke-2). Bandung: Alfabeta.
- UNICEF. (2023). Child Protection: Violence Against Children.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- World Health Organization (WHO). (2024). Violence Against Women.
- Widodo, & Mulyadi. (2020). Referensi terkait asesmen awal dan pelayanan perlindungan anak korban kekerasan.
- Yuli. (2023). Responsivitas Pelayanan Publik terhadap Kelompok Rentan dalam Perspektif Administrasi Publik.
- Yuliani. (2020). Referensi terkait peran DP3AP2KB dalam kebijakan perlindungan perempuan dan anak.
- Yuliani, S., & Rahmawati, D. (2022). Pelayanan Publik bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan melalui Pendekatan Empati. Jurnal Administrasi Publik.
- Zeithaml, V. A., Parasuraman, A., & Berry, L. L. (1988). Communication and Control Processes in the Delivery of Service Quality. Journal of Marketing.